

**RENCANA AKSI KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024**

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan , KPU Kota Probolinggo perlu menyusun sebuah perencanaan, hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Perencanaan disusun oleh KPU Kota Probolinggo berupa Rencana Aksi Kinerja (RAK) untuk periode 1 (satu) tahun.

RAK KPU Kota Probolinggo memuat perencanaan program, kegiatan dan Anggaran dari masing – masing bagian, yaitu :

1. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2. Bagian Perencanaan Data dan Informasi
3. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum , Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
4. Bagian Hukum dan SDM

Selanjutnya RKA dimaksud digunakan sebagai pedoman bagi KPU Kota Probolinggo untuk melaksanakan kegiatan selama Tahun 2024. yang dalam perjalanannya perlu dilakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan yang disusun melalui kegiatan evaluasi secara berkala.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan RAK KPU Kota Probolinggo Tahun 2024 adalah :

1. Terciptanya pelaksanaan kegiatan KPU Kota Probolinggo di Tahun 2024 sesuai visi, misi dan tujuan dan berjalan sesuai sistematika yang transparan dan akuntabel;
2. Menjadi guidance pelaksanaan kegiatan KPU Kota Probolinggo di Tahun 2024 serta pengendaliannya.

C. Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan dan penjabarannya terhadap program dan kegiatan di Lingkungan KPU Kota Probolinggo berdasarkan Dokumen dan kertas kerja Anggaran K/L DIPA APBN KPU Kota Probolinggo.

BAB.II

VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KOTA PROBOLINGGO

A. Visi KPU Kota Probolinggo

KPU Kota Probolinggo terus memperbaiki pelayanannya sebagai penyelenggara Pemilu dengan terus berkomitmen “ ***Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas***”

Mandiri memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang – undangan ; Profesional, memiliki arti berkepastian hukum , berkompeten , aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif , efisien dan mendahulukan kepentingan umum, Berintegritas, memiliki arti jujur, adil, transparan dan akuntabel.

B. Misi KPU Kota Probolinggo

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada peraturan – undang dan kode etik penyelenggara pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu Serentak yang efektif dan efisien , transparan, akuntabel , serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi Informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak ;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. Tujuan KPU Kota Probolinggo

Sesuai Visi Misi KPU Kota Probolinggo , maka tujuan dari KPU Kota Probolinggo adalah:

1. Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
2. Sebagai Penyelenggara Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efektif dan efisien;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia , Jujur dan Adil.

BAB. III

RENCANA AKSI KINERJA

Pada Tahun 2024 , sebagaimana termuat dalam **DIPA Nomor : SP DIPA 076.01.2.658021/2024 tanggal 24 November 2023 KPU Kota Probolinggo** mendapatkan pagu anggaran APBN sebesar Rp. **18.827.919.000** dan dengan adanya direvisi menjadi **40.377.837.000**

Pagu anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) program, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) sebesar Rp. 16.416.186.000
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) sebesar Rp. 2.411.733.000

Dari pagu anggaran masing – masing program, dijabarkan Kembali menjadi rencana program dan anggaran masing – masing bagian sebagai berikut :

A. RENCANA AKSI KINERJA KPU KOTA PROBOLINGGO

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAR GET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PENANGGUNG JAWAB
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
PENGELOLAAN PENGADAAN LAPORAN DAN DOKUMENTASI LOGISTIK	. Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik . Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistic	100%	1.Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu /Pemilihan	√	√	√	√	

	keperluan Pemilu/Pemilihan . Persentase satker yang mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu . Persentase satker yang menginventarisasi dan memelihara logistic pemilu/pemilihan sebelum pemungutan suara pemilu/pemilihan							
	Persentase penyediaan logistic Pemilu	100%	2.Ketersediaan logistic Pemilu	√	√	√	√	
	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	3.Ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu	√	√	√	√	
PENINGKATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN –	1.Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU 2.Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji public kepada pemangku kepentingan 3.Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan – undangan	100%	1.Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang – undangan 2.Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan sinkronisasi hukum	√	√	√	√	

	4. Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara tepat , cepat dan sesuai dengan SOP							
HUBUNGAN MASYARAKAT , INFORMASI PUBLIK DAN PENDIDIKAN PEMILIH	1.Kpu Kota Probolinggo yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pilih 2.Persentase KPU Kota Probolinggo yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu/RPP 3.Persentase KPU Kota Probolinggo yang memiliki Pendidikan Pilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum 4.Persentase KPU Kota Probolinggo yang memiliki Pendidikan Pilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pilih perempuan 5. Persentase KPU Kota Probolinggo yang memiliki Pendidikan Pilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pilih perempuan 6.Persentase KPU Kota Probolinggo yang memiliki Pendidikan Pilih Kepemiluan untuk pilih pemula 7.Persentase KPU Kota Probolinggo yang memiliki Pendidikan	100%	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Pendidikan Pilih kepada masyarakat umum Pendidikan Pilih kepada Pilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	√	√	√	√	

	Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih disabilitas							
	Persentase KPU Kota Probolinggo dengan Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu, rawan konflik, bencana dan daerah dengan partisipasi masyarakat rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	100%	Pendidikan Pemilih kepada Daerah partisipasi rendah, rawan potensi pelanggaran pemilu dan daerah rawan konflik/bencana	√	√	√	√	
	- Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP - Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu /Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional - Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di medsos KPU Kota Probolinggo paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	√	√	√	√	
	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di medsos/media publikasi	100%	Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholders (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan	√	√	√	√	

			n Tinggi dan Masyarakat)					
ADVOKASI DAN SENGKETA HUKUM	1. Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum 2. Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke MK 3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	√	√	√	√	
TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN	1. Persentase KPU Kota Probolinggo yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal 2. Persentase KPU Kota Probolinggo dalam pemutakhiran data wilayah /pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan	100%	1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	√	√	√	√	
	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Probolinggo yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja		2. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	√	√	√	√	
	Persentase calon peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	3. Pengelolaan calon peserta pemilu	√	√	√	√	
	Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata Kelola KPU	100%	4. Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan pemilu / Pemilihan guna mendukung	√	√	√	√	

			tata Kelola KPU					
	1. Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi Partai Politik atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan	100%	5. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye dan verifikasi Partai Politik	√	√	√	√	

B. RENCANA AKSI KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA PROBOLINGGO

Sasaran Pogram	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				PenanggungJawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase Pejabat perbendaharaan/p engelola keuangan yang menyelesaikan pertanggungjawab an penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	1. Meningkatnya pembinaan perbendahara an	√	√	√	√	1. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	2. Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	√	√	√	√	
	Jumlah draft juklak /juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	100%	3. Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota Probolinggo	√	√	√	√	

	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	4. terselesaikan nya permasalahan pengelolaan keuangan	√	√	√	√	
	Persentase KPU Kota Probolinggo yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	5. Tersusunnya laporan pertanggungja waban penggunaan anggaran	√	√	√	√	
	1. Persentase KPU Kota Probolinggo yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material 2. Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100%	6. Terwujud nya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	√	√	√	√	
Manajemen Perencanaan dan Organisasi	Jumlah fasilitasi Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan Demokrasi	100%	1. Terwujud nya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	√	√	√	√	
	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%	2. Terwujud nya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Probolinggo yang efektif dan efisien	√	√	√	√	

	1) Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu 2) Persentase KPU Kota Probolinggo yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja 3) Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	100%	3. Terwujudnya Sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	√	√	√	√	
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1) Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat 2) Persentase Penegakan disiplin pegawai	100%	1. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	√	√	√	√	Devisi Parmas dan SDM
	1) Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel 2) Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-undangan	100%	2. Terlaksananya layanan pengaduan pegawai secara transparan dan akuntabel	√	√	√	√	
	Persentase Anggota KPU Kota	100%	3. Terlaksananya proses	√	√	√	√	

	Probolinggo yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW		seleksi anggota KPU Kota Probolinggo sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku					
	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	100%	4. Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	√	√	√	√	
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	100%	5. Jumlah rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	√	√	√	√	
	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu yang diseleksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku	100%	5. Tersedianya jabatan fungsional Penata Kelola Pemilu sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku	√	√	√	√	
	Jumlah Badan Adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	7. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	√	√	√	√	
Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	1. Jumlah rancangan Peraturan KPU tentang kearsipan yang telah disusun 2. Persentase KPU Kota Probolinggo yang mengelola arsip inaktif	100%	1. Meningkatkan kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	√	√	√	√	

	sesuai aturan kearsipan							
	1. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik 2. Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik 3. Persentase Gedung dan Gudang KPU Kota Probolinggo yang berfungsi dengan baik	100%	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	√	√	√	√	
	1. Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang digunakan bersamaan dalam waktu dua tempat 2. Persentase hasil rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	√	√	√	√	
	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Probolinggo yang dapat ditanggulangi	100%	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Probolinggo	√	√	√	√	
Pemeriksaan Internal KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil	100%	Meningkatnya efektifitas pengawasan	√	√	√	√	

	pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran		internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kota Probolinggo					
	Nilai Maturitas SPIP	100%	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	√	√	√	√	
	Nilai Kapabilitas APIP	100%	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	√	√	√	√	
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean overnance)	√	√	√	√	
	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK , BPKP, dan APIP KPU dalam tujuan KPU Kota Probolinggo	√	√	√	√	
	Persentase KPU Kota Probolinggo yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	√	√	√	√	
	Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	100%	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	√	√	√	√	
PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI	1. Persentase KPU Kota Probolinggo yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	Tersedianya data informasi , sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government KPU Kota Probolinggo	√	√	√	√	Divisi Perencanaan data dan Informasi

	2. Persentase sarana dan prasarana Teknologir Informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancer 3. Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi							
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM 2. Jumlah PNS KPU Kota Probolinggo yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas lainnya (IT, Akuntansi dan Hukum) sesuai jadwal	100%	Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kota Probolinggo	√	√	√	√	
	Jumlah kajian litbang dan jurnal Kepemiluan yang dapat diselesaikan dengan waktu yang tepat	100%	Terwujudnya kajian litbang dan jurnal Kepemiluan	√	√	√	√	

BAB. III

Demikian Dokumen RAK Tahun 2024 ini dibuat dan disusun oleh KPU Kota Probolinggo, Dokumen ini menjadi Pedoman Pelaksanaan Program dan Anggaran di Lingkungan KPU Kota Probolinggo . Evaluasi terhadap Perencanaan Program dan Anggaran akan dilaksanakan di setiap Triwulan dalam rangka Pengendalian.

PROBOLINGGO, 18 JANUARI 2024
SEKRETARIS/KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AGUS SETIYONO